

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN
SKRIPSI

**Kekuatan Teknik Undercover Buy Atau Pembelian Terselubung Oleh Penyidik Polri
Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika**

Oleh

RIZAL DUNGGIO

271411137

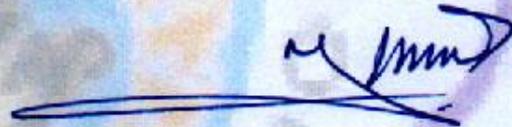
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

PEMBIMBING I



Moh. Basdyanto U. Puluhulawa SH.M.Hum
NIP 197011051997031001

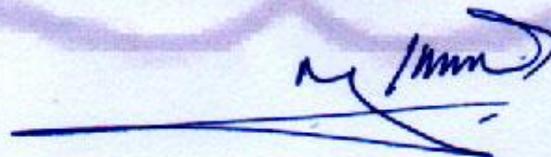
PEMBIMBING II



Suwitno Y. Imran SH.MH
NIP198306222009121004

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Y. Imran SH.MH
NIP 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Kekuatan Teknik Undercover Buy Atau Pembelian Terselubung Oleh Penyidik Polri
Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika

(Studi Kasus Polres Bonebolango)

Oleh

RIZAL DUNGGIO
271411137

Telah memenuhi syarat dan dipertahankan di depan dewan penguji pada :

Hari/Tanggal : jumat/27 Juli 2018

Pukul : 10.00 WITA

Komisi Penguji

1. DR.FENCE. M. WANTU. SH. MH
NIP 197401192001121001

2. ISMAIL. H TOMU. SH. MH
NIP 197706172009121003

3. MOH. RUSDIYANTO U. PULUHULAWA. SH. M. HUM
NIP 197011051997031001

4. SUWITNO. Y. IMRAN. SH. MH
NIP 198306222009121004

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo



MOH. RUSDIYANTO U. PULUHULAWA. SH. M. HUM
NIP 197011051997031001

ABSTRAK

RIZAL DUNGGIO, NIM 271411137, SKRIPSI, KEKUATAN TEKNIK UNDERCOVER BUY ATAU PEMBELIAN TERSELUBUNG OLEH PENYIDIK POLRI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Hal ini dilatarbelakangi adanya kenyataan makin marak dan meluasnya penyalahgunaan narkoba yang terjadi dikalangan masyarakat tertentu dan sampai saat ini keberadaannya masih belum bisa diberantas sampai keakar-akarnya. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah bersifat Normatif empiris dan objek penelitian di Polres Bonebolango. Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden atau juga narasumber sebagai data utamanaya, dengan didukung sumber data lain diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Undercover Buy atau pembelian terselubung sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No 22 Tahun 1997 kemudian telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamerupakan penambahan kewenangan penyidik dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Hal ini karena mengingat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan terorganisasi, rahasia serta dalam pelaksanaannya menggunakan modus operandi dan teknologi yang tergolong canggih sehingga sulit dalam mengumpulkan barang buktinya. Berbeda dengan tindak pidana lainnya pelaksanaan pembelian terselubung dalam tindak pidana narkoba tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia bila dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, akan menjadi berbeda bila tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pelaksanaan pembelian terselubung tidak terlepas dan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat yang ikut serta harus dilindungi hak-haknya. Untuk mengurangi kesalahan dan pelaksanaan pembelian terselubung tersebut maka perlu diketahui dan dipahami secara jelas oleh penyidik tentang pelaksanaan pembelian terselubung itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009.

Kata kunci: Polisi, Kejahatan Narkotika, Kekuatan Teknik Pembelian Terselubung

ABSTRACT

RIZAL DUNGGIO, STUDENT ID. 271411137. UNDERGRADUATE THESIS.
POWER OF UNDERCOVER BUY TECHNIQUES BY POLRI
INVESTIGATORS IN DISCLOSURE OF NARCOTICS CRIMINAL ACT

It is motivated by the fact of the widespread misuse of narcotics that occurred among certain people and until now its existence still cannot be eradicated until its roots. The method used by the researcher is normative empirical, and the object of research was taken at Polres Bonebolango. Approach method in this research was carried out directly to the respondent or also informant as the main data, supported by other data source obtained by way of literature study. Undercover buy as regulated by Law No. 22 of 1997 has subsequently been replaced by Law Number 35 of 2009 on Narcotics is the addition of the authority of investigators in the effort to eradicate illicit narcotics. This is because considering the crime of Narcotics abuse is an organized crime, secret and in the implementation using the modus operandi and sophisticated technology, so it is difficult to collect the evidence. Unlike other crimes, the implementation of undercover buy in a narcotics crime is not contradictory to human rights if it is carried out in accordance with applicable regulations. However, it will be different if it is not implemented in accordance with applicable regulations. This is because the implementation of undercover buy is inseparable from the participation of the community so that the people who participate must be protected by their rights. To reduce the errors and implementation of such undercover buy, it is necessary to be clearly understood by the investigator about the implementation of the covert purchase itself as provided for in Law No. 35 of 2009.

Keywords: Police, Narcotics crime, Power of Undercover Buy Technique

